PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH
(Survei pada Pemerintah Kota Bandung)

THE INFLUENCE OF THE ORIGINAL REVENUE
AND BALANCED FUNDS TO LOCAL BUDGET
(Survey At The City Government Of Bandung)

RIMA MARLIA
21110041

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

The phenomenon occurs is revenue still small when compared with the balance fund revenue when one of the main sources of financing regional expenditures. The purpose of this study is to determine how much influence revenue and balanced fund of the local budget in the City of Bandung. The method used in this study is desktiptif and verification methods with quantitative approaches. The unit of analysis in this study is the realization Reports Revenue and Expenditure in the Government of Bandung as many as 13 (thirteen) years ie from 2001 to 2013. The test statistic used is the calculation of correlation, multiple regression analysis, the coefficient of determination and to test the hypothesis that use the t test by using SPPS 20.0 for windows. The results showed that original revenue significantly influence regional expenditure and balance fund significantly influence the regional expenditure. The coefficient of determination indicates that the original revenue and fund balance has a strong influence on local budget.

Keywords: *Original Revenue, Fund Balance, Local Budget*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi ditandai dengan pergantian pemerintah Orde Baru kepada Orde Reformasi pada tahun 1998. Dalam manajemen keuangan daerah, reformasi ditandai dengan pelaksanaan Otonomi Daerah (Abdul Halim, 2002). Otonomi daerah dan desentralisasi berlaku sejak tahun 2001, merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah (Hadi Sasana, 2011). Untuk merealisasikan otonomi daerah tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan dua peraturan yaitu Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto, 2010). Tujuan utama ditetapkannya kedua Undang-Undang tersebut adalah desentralisasi. Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektivitas, akuntabel, transparan, dan respontif secara berkesinambungan (Mardiasmo, 2009).

Pelimpahan tanggung jawab diikuti dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengerti dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya, selain itu pemerintah daerah juga diharapkan agar dapat lebih menggali sumber-sumber atau potensi daerahnya sehingga bisa membiayai pengeluarannya untuk pelaksanaan belanja daerahnya (Hadi Soesantro dkk. 2005).

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan

kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Adapun struktur belanja berdasarkan kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung (Budi S. Purnomo, 2009).

Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi, terletak pada kemampuan keuangan daerah, dimana daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar (Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2005). Masalah yang dihadapi sekarang adalah masih lemahnya kemampuan daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga akan menimbulkan pengaruh langsung terhadap kemampuan daerah untuk membiayai anggaran rutin dan anggaran pembangunan di hampir beberapa daerah (Jessy Christin, 2013).

Pemeritah daerah seharusnya tidak bergantung dengan dana perimbangan, dalam membentuk kemandirian daerahnya, jika dana perimbangan tidak ada maka perputaran roda keuangan akan sangat buruk. Pada kenyataannya, pemerintah daerah masih sangat tergantung kepada pusat untuk menopang kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta dijadikan sebagai sumber penerimaan utama daerah untuk membiayai belanja daerahnya (Hadi Sasana, 2012). Hampir di semua daerah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangansumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah. Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas (Ahmad Yani, 2002).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa masalah yang dapat diteliti dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Lemahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai belanja daerahnya
2. Pemerintah Daerah masih bergantung terhadap Dana Perimbangan untuk membiayai belanja daerahnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa masalah yang dapat diteliti dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah .
2. Seberapa besar pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.
2. Untuk mengetahu seberapa besar pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.

2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim dan Muhammad (2013:101), Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Hanif Nurcholis (2009:182), yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah,dan lain-lain PAD yang sah. Soleh dan Rochmansjah (2010:63), mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah sebagai penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah ynag dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah
   Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemda (pemerintah daerah) tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemda dan pembangunan daerah (Mulyana, Subkhan dan Slamet, 2006:110).
2. Retribusi Daerah
   Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemda (pemeritah daerah) untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Mulyana, Subkhan dan Slamet, 2006:118).

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010:67) retribusi dibagi menjaddi tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retrubusi Perizinan tertentu
3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

2.1.2 Dana Perimbangan

a. Pengertian Dana Perimbangan

Menurut Widjaja (2009:129), Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Nordiawan, Putra, dan Rahmawati (2012:48), mendefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Nordiawan, Putra, dan Rahmawati, 2010: 49).

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Nordiawan, Putra, dan Rahmawati, 2012: 56).

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian

dari program yang menjadi prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Dan program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Renja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan desentralisasi .

2.1.3 Belanja Daerah

a. Pengertian Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah dari rekening kas umum daerah sebagai pengurang kekayaan bersih atau ekuitas dana lancar pada tahun yang bersangkutan yang tidak diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah (Arif, Musclis dan Iskandar, 2009: 188).

Menurut Nunuy Nur Afiah (2010:15), yang dimaksud dengan Belanja Daerah adalah belanja daerah yang meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah meliputi belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan belanja tidak langsung yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program.

b. Klasifikasi Belanja Daerah

Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010: 99), Pengeluaran Daerah (Belanja Daerah) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, fungsi, organisasi, dan kelompok belanja. Belanja daerah menurut urusan pemerintahan terdiri atas belanja menurut urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Sholeh dan Rochmansjah, (2010: 99) menjelaskan bahwa, belanja daerah menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota, provinsi dan pusat seperti: pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan pariwisata dan budaya, pendidikan serta perlindungan sosial.

Menurut Budi S. Purnomo (2009:43), menjelaskan bahwa klasifikasi belanja daerah menurut organisasi disesuikan dengan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah daerah. Sedangkan klasifikasi belanja daerah menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan langsung.

Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri atas:

1. Belanja Pegawai
2. Bunga
3. Subsidi
4. Hibah
5. Bantuan Sosial
6. Belanja Bagi Hasil
7. Bantuan Keuangan
8. Belanja Tidak Terduga

Sedangkan belanja langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Kelompok belanja ini terdiri atas:

1. Belanja pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
2. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
3. Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

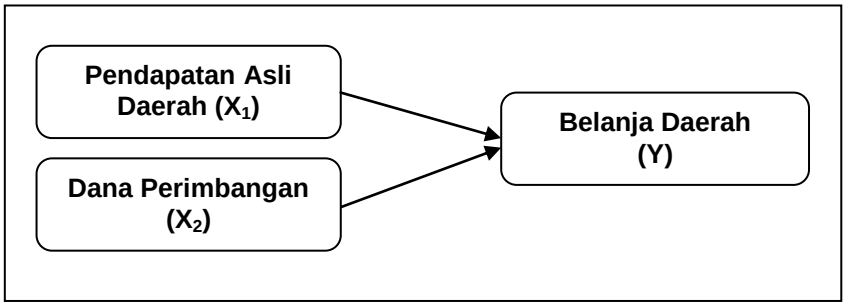
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. (Widjaja, 2003:42). Menurut Bahtiar Arif, Muchlis & Iskandar, (2009:171), pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Anggaran pendapatan merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja.

2.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Dana Perimbangan adalah yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah (Abdul Halim, 2004:69). Menurut Hadi Sasana (2011: 50), dana perimbangan merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Perimbangan keuangan dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pemikiran berikut ni:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teoritis dan kerangka pemikiran diatas di atas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

H_2: Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan dengan hal-hal jika dianggap perlu. (Husen Umar, 2005:303). Objek penelitian yang penulis teliti adalah pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dan Perimbangan terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

1. Menetapkan permasalahan sebagai indikasi dari fenomena.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.

3. Menetapkan rumusan masalah.
4. Menetapkan tujuan penelitian.
5. Menetapkan hipotesis penelitian, berdasarkan fenomena dan dukungan teori.
6. Menetapkan konsep variabel sekaligus pengukuran variabel penelitian yang digunakan.
7. Menetapkan sumber data, teknik penentuan sampel dan teknik pengumpulan data.
8. Melakukan analisi data.
9. Melakukan pelaporan hasil penelitian.

Tabel 3.1
Desain Penelitian

Tujuan Penelitian	Desain Penelitian			
	Jenis Penelitian	**Metode yang digunakan**	**Unit Analisis**	***Time Horizon***
T-1	Deskriptif dan Verifikatif	Explanatory Survey	Pemerintah Kota Bandung	*Time Series*
T-2	Deskriptif dan Verifikatif	Explanatory Survey	Pemerintah Kota Bandung	*Time Series*

Sumber : Umi Narimawati dkk 2010.

Dari tabel di atas kemudian penulis menguraikan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asi Daerah terhadap Belanja Dearah.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Dearah.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Berdasarkan judul penelitian yang telah dikemukakan di atas yaitu “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah”. Maka variabel-variabel yang diteliti dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Variabel Bebas/*Independent* (X)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam hal ini variabel bebas yang akan diteliti yaitu X_1 Pendapatan Asli Daerah dan X_2 *Dana Perimbangan*.

2. Variabel tidak Bebas/*dependent* (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel tidak bebas (Y) adalah Belanja Daerah.

3.2.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalan penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu dalam bentuk angka-angka yang menunjukkan nilai dari besaran atau variabel yang mewakilinya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) dari objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian baru para pengguna (Andi Supangat, 2007:2).

3.2.4 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang diambil oleh penulis adalah laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Bandung sejak dimulainya otonomi daerah pada tahun 2001 sampai sekarang atau selama periode 2001-2013 yaitu sebanyak 13 tahun.

3.2.5 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi, maka dilakukan dengan teknik yang digunakan sesuai dengan judul penulis yaitu *non probability sampling*. Jenis *non probability sampling* yang akan digunakan oleh penulis adalah sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2013:68), sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota dijadikan sampel.

3.2.6 Metode Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

,Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan, (Umi Narimawati, 2010:40). Dokumentasi yang dilakukan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, umumnya tentang laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung tahun 2001-2013.

2. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca literatur-literatur, buku-buku mengenai teori permasalahan yang diteliti dan menggunakan media internet sebagai media pendukung dalam penelusuran informasi tambahan mengenai teori maupun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.3 Metode Pengujian Data

3.3.1 Rancangan Analisis

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kuntitatif. Adapun langkah-langkah analisis kuantitatif yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada analisis regresi berganda maka dilakukan pengujian asumsi klasik agar hasil yang diperoleh merupakan persamaan regresi yang memiliki sifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE).

a. Uji Normalitas
b. Uji *Multikolinieritas*
c. Uji *Heteroskedastisitas*
d. Uji *Autokorelasi*

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan variabel dependen (Y) dan variabel independen (X1 dan X2). Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Sumber: (Sugiyono, 2009:192)

Dimana:

Y = Variabel terikat (Belanja Daerah)
a = Bilangan berkonstanta
b_1,b_2 = Koefisien arah garis
X_1 = Variabel bebas X_1 (Pendapatan Asli Daerah)
X_2 = Variabel bebas X_2 (Dana Perimbangan)

3. Analisis Korelasi Pearson

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional.

4. Analisis Koefisien Determinasi Parsial

Digunakan untuk melihat sebarapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) secara parsial.

KD = B x *Zero Order* x 100%

Sumber : Gujarati (2003: 172)

Dimana:
B = Standar koefisien Beta
Zero Order = Matrik korelasi variabel bebas dengan variabel terikat

5. Pengujian Hipotesis

Pada prinsipnya pengujian hipotesis ini adalah membuat kesimpulan sementara untuk melakukan penyanggahan dan atau pembenaran dari masalah yang akan ditelaah dan merupakan cara dalam statistika untuk menguji populasi berdasarkan statistik sampelnya, untuk dapat diterima atau ditolak pada tingkat signifikansi tertentu. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t (pengujian signifikansi secara parsial).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan melalui tahapan sebagai berikut: Pengujian uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis korelasi, analisis determinasi, serta pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan *software SPSS Version* 20.0 *for windows* dan untuk lebih jelasnya akan dibahas berikut ini:

1. Uji Asusmsi Klasik
   a. Uji Normalitas

Tabel 4.1
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		13
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0001221
	Std. Deviation	164592441646.08280000
Most Extreme Differences	Absolute	.119
	Positive	.119
	Negative	-.113
Kolmogorov-Smirnov Z		.430
Asymp. Sig. (2-tailed)		.993

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada tabel 4.4 dapat dilihat nilai probabilitas (sig.) yang diperoleh dari uji *Kolmogorov Smirnov* sebesar 0,993. Karena nilai probabilitas pada uji *Kolmogorov-Smirnov* masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 4.2
Hasil Pengujian Asumsi Multikorelasi

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	.366	2.733
	DP	.366	2.733

a. Dependent Variable: BD

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.5 di atas menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel independen. Nilai VIF dari kedua variabel bebas sebesar 2.733 masih < 10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variable bebas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Correlations

			PAS	DB	ABS_RES
Spearman's rho	PAD	Correlation Coefficient	1.000	.973(**)	.330
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.271
		N	13	13	13
	DP	Correlation Coefficient	.973(**)	1.000	.335
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.263
		N	13	13	13
	ABS_RES	Correlation Coefficient	.330	.335	1.000
		Sig. (2-tailed)	.271	.263	.
		N	13	13	13

Pada tabel 4.6, nilai signifikansi yang diperoleh variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (*error*) sebesar 0,271 dan 0,263. Nilai tersebut memiliki signifikansi lebih dari tingkat kekeliruan 0,05. Hal ini memberikan suatu indikasi bahwa residual *(error)* yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama atau homogen, maka dapat ditarik kesimpulan tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

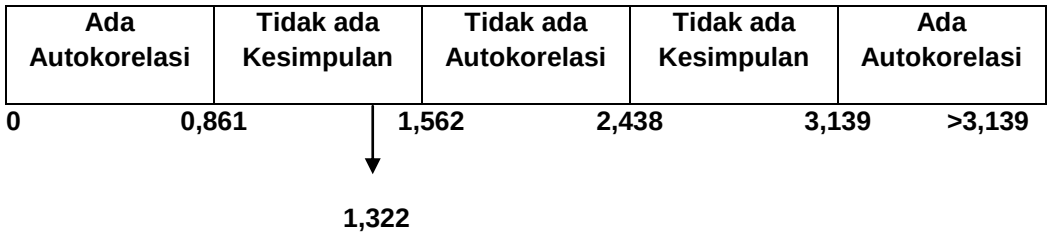
Tabel 4.4
Nilai Durbin-Watson untuk Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.989(a	.979	.974	180301986168.82550	1.322

a. Predictors: (Constant), DP, PAD
b. Dependent Variable: BD

Nilai D-W yang diperoleh dari model dibandingkan terhadap nilai tabel *Durbin-Watson* didapat hasil sebesar 1,322 sehingga berada pada nilai batas bawah DU sebesar 1,562 dan nilai batas atas 4-DU sebesar 2,438.



Dengan melihat angka D-W berada dalam rentang 0,861 dan 1,562 yaitu di daerah tidak ada kesimpulan maka hasil yang diperoleh dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini model regresi yang diperoleh tidak ada kesimpulan.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.5
Hasil Estimasi Model Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	-393568254343.070	1645703607 29.714		-2.391	.038
	PAD	1.374	.218	.481	6.298	.000
	DP	1.438	.195	.563	7.379	.000

Melalui hasil pengolahan data seperti diuraikan pada Tabel 4.5 maka dapat dibentuk model prediksi variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah, dengan persamaan regresi:

$$Y = -393568254343.070 + 1.374X_1 + 1.438X_2$$

Dimana:
Y = Belanja Daerah
X_1 = Pendapatan Asli Daerah
X_2 =Dana Perimbangan

Koefisien yang terdapat pada persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar Rp -393.568.254.343,070 menunjukkan rata-rata Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bandung selama periode tahun 2001-2013 jika Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sama dengan nol.
2. Belanja Daerah memiliki koefisien bertanda positif sebesar 1,374, artinya setiap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 persen diprediksi akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 1,374 rupiah, dengan asumsi Pendapatan Asli Daerah tidak berubah.
3. Dana Perimbangan memiliki koefisien bertanda positif sebesar 1,438, artinya setiap peningkatan Dana Perimbangan sebesar 1 pesen diprediksi akan meningkatkan belanja daerah sebesar 1,438 rupiah dengan asumsi Dana Perimbangan tidak berubah.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

a. Korelasi Pearson Pendapatan Asli Daetah dengan Belanja Daerah

Korelasi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah ketika Dana Perimbangan tidak berubah adalah sebesar 0,894 dengan arah positif. Nilai korelasi sebesar 0,894 berada diantara 0,81-1,00 yang tergolong dalam kriteria korelasi sangat kuat. Artinya hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah sangat kuat ketika Dana Perimbangan tidak mengalami perubahan. Ini menggambarkan bahwa ketika Pendapatan Asli Daerah meningkat, sementara Dana Perimbangan tidak berubah maka akan meningkatkan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Bandung

b. Koefisien Determinasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Besarnya pengaruh pendapatan asli daerah dengan belanja daerah ketika dana perimbangan tidak mengalami perubahan adalah sebesar 0,0481 x 0,929 x 100% = 44,7%.

KD = B x *Zero Order* x 100%

KD = 0, 481x 0,929 x 100 %

KD = 44,7%

Diperoleh pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Pemerintah Kota Bandung adalah 44,7%. Jadi pendapatan asli daerah memberikan kontribusi sebesar 44,7% terhadap perubahan belanja daerah Pemerintah Kota Bandung.

c. Pengujian Hipotesis Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji t sebesar 2,228 yang diperoleh dari t_{tabel} pada α = 0,05 dengan derajat kebebasan (*Degree of Freedom*) =10, untuk pengujian dua pihak. Nilai statistik t_{hitung} yang digunakan pada pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
***Coefficients* untuk Uji t**

Coefficients[a]

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-2.391	.038
	PAD	6.298	.000
	DP	7.379	.000

a. Dependent Variable: BD

Nilai t_{hitung} yang diperoleh Pendapatan Asli Daerah dari hasil *SPSS for Windows versi* 20.0 pada tabel 4.11 adalah sebesar 6.298 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai t_{hitung} (6,298) lebih besar dari t_{tabel} (2,228) pada tingkat kekeliruan 5% dengan ketentuan pengujian dilakukan secara dua sisi; maka nila α akan menjadi α/2 atau 5%/2 jadi untuk sisi kanan nilai α sebesar 2,5% (0,025) dan untuk sisi kiri nilai α sebesar 2,5% (0,025) dapat diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha. Artinya, pada tingkat keyakinan 95% dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bandung.

4. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

a. Korelasi Pearson Dana Perimbangan dengan Belanja Daerah

Korelasi pearson antara Dana Perimbangan dengan Belanja Daerah ketika Pendapatan Asli Daerah tidak berubah adalah sebesar 0,919 dengan arah positif. Nilai korelasi sebesar 0,919 berada diantara 0,81-1,00 yang tergolong dalam kriteria korelasi sangat kuat. Artinya hubungan Dana Perimbangan dengan Belanja Daerah sangat kuat ketika Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami perubahan. Ini menggambarkan bahwa ketika Dana Perimbangan meningkat, sementara Pendapatan Asli Daerah tidak berubah maka akan meningkatkan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung.

b. Koefisien Determinasi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Besarnya pengaruh *non performing financing* keuangan dengan *return on assets* ketika *financing to deposits ratio* tidak mengalami perubahan adalah sebesar 0,563 x 0,946 x 100 % = 53,3%.

KD = B x *Zero Order* x 100%

KD = 0,563 x 0,946 x 100 %

KD = 53,3%

Diperoleh pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah Pemerintah Kota Bandung adalah 53,3%. Jadi dana perimbangan memberikan kontribusi sebesar 53,3 terhadap perubahan belanja daerah Pemerintah Kota Bandung.

c. Pengujian Hipotesis Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji t sebesar 2,228 yang diperoleh dari t_{tabel} pada α = 0,05 dengan derajat kebebasan (*Degree of Freedom*) =10, untuk pengujian dua pihak. Nilai statistik t_{hitung} yang digunakan pada pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
***Coefficients* untuk Uji t**

Coefficients[a]

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-2.391	.038
	PAD	6.298	.000
	DP	7.379	.000

a. Dependent Variable: BD

Nilai t_{hitung} yang diperoleh Dana Perimbangan dari hasil *SPSS for Windows versi* 20.0 pada tabel 4.11 adalah sebesar 7,379 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai t_{hitung} (3,379) lebih besar dari t_{tabel} (2,228) pada tingkat kekeliruan 5% dengan ketentuan pengujian dilakukan secara dua sisi; maka nila α akan menjadi α/2 atau 5%/2 jadi untuk sisi kanan nilai α sebesar 2,5% (0,025) dan untuk sisi kiri nilai α sebesar 2,5% (0,025) dapat diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha. Artinya, pada tingkat keyakinan 95% dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah berdasarkan perhitungan dari tingkat signifikansi dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Selain itu, perhitungan dari koefisen korelasi menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan positif terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini didukung oleh penelitian Gregorius dan Sukartono (2009) yang memperlihatkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah diterima secara signifikan, dan menurut Kesit Bambang Prakosa (2004) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Menurut Diah Ayu Kusumadewi dan Arief Rahman (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan menurut Hadi Sasana (2011) Pendapatan Asli Daerah berhubungan positif dengan Belanja Daerah, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan dengan Belanja Daerah. Hal tersebut dikarenakan relatif kecilnya Pendapatan Asli Daerah terhadap total Belanja Daerah.

Menurut Hadi Hadi Sasana (2011) bahwa semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin besar alokasi Belanja Daerahnya, sehingga terdapat hubungan yang positif antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Yuriko Ferdian (2013) dalam Aziz et al (2004) dalam Syukriy dan Halim (2003), yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

4.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah berdasarkan perhitungan dari tingkat signifikansi dapat dilihat bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Selain itu, perhitungan dari koefisien korelasi menyatakan bahwa Dana Perimbangan memiliki hubungan positif dan terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini didukung oleh Hadi Sasana (2011) menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, dan menurut Gregorius dan Sukartono (2009) bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah diterima secara signifikan. Yuriko Ferdian (2013) dan Ihyaul Ulum (2005) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Peningkatan dana perimbangan akan meningkatkan belanja daerah.

Dalam hal ini kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan dana perimbangan yang diterima. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Riyanto (2005) dalam Yuriko Fedian (2013) yang menyatakan peningkatan pengeluaran pemerintah daerah pada era desentralisasi ini lebih disebabkan oleh aliran dana perimbangan yang juga meningkat dari pemerintah pusat ke daerah. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikatakan Widjaja (2004) dalam Yuriko Fedian (2013) bahwa transfer dana perimbangan yang meningkat ke daerah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. Maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik simpulan sekaligus saran sebagai berikut:

5.1 Simpulan

1. Pendapatan Asli Daerah berhubungan positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hasil analisis korelasi menunjukkan pengaruh antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah secara parsial berbanding lurus (bersifat positif), jadi semakin besar pendapatan asli daerah maka belanja daerah diprediksi akan semakin tinggi.

2. Dana Perimbangan berhubungan positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hasil analisis korelasi menunjukkan pengaruh antara dana perimbangan dengan belanja daerah secara parsial berbanding lurus (bersifat positif), jadi semakin besar dana perimbangan maka belanja daerah diprediksi akan semakin tinggi.

5.2 Saran

1. Pemerintah kota Bandung harus melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah agar bisa lebih menggali potensi pendapatan asli daerah, yaitu dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak daerah serta mencari objek pajak baru yang potensial.
2. Pemerintah Kota Bandung harus bisa meminimalkan sumber dana dari pemerintah pusat yaitu berupa Dana Perimbangan dan diharapkan lebih mandiri sehingga tidak terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota Bandung harus menggunakan dana perimbangan secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatkan standar pelayanan publik minimum serta disajikan secara transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi, S. (2007). *Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arif, Bahtiar, Muchlis, & Iskandar. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Akademia.

Budi, Purnomo S. (2009). *Obligasi Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Chabib, Soleh & Rochmansjah, Heru. (2010). *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.* Bandung: Fokusmedia

Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, & Maulidah Rahmawati. (2012). *Akuntasi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Deddi Nordiawan, Ayuningtyas Hertianti. (2010). *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

Diah Ayu Kusumadewi, Arief Rahman. (2007). *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia

Gregorius N. Masdjodjo, Sukartono. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Sertra Analisis *Flypaper Effect* Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. *TEMA* Vo. 6 Edisi 1, Maret. ISSN: 1693-9727.

Gujarati, Damodar. (2003). *Ekonometrika Dasar* : Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.

Hadi Sasana. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE),* Maret 2011, Hal. 46 – 58 Vol. 18, No. 1 ISSN: 1412-3126.

Hadi Soesantro, Aida Budiman, Ninasapti Triaswati, Armida Ali, Sri Adiningsih. (2005). *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir.* Kanisius. Yogyakarta.

Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi.* Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul, M. Kusufi, Syam. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat, Edisi 4.

Halim Abdul. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangann Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

HAW. Widjaja. (2009). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* . Jakarta: Rajawali Pers.

Husein, Umar. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo.

I Dewa Gde Bisma, Hery Susanto. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. *Ganec Swara Edisi Khusus* Vol. 4 No.3.

Ihyaul Ulum. (2005). Analisis Atas Data Dana Perimbangan Dan Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia. *HUMANITY*. Vo. 1 No.1

Jessy Christine Mangowal. (2013). Pendapatan Daerah Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. ISSN: 2303-1174, Vol. 1, No. 4, p. 1386-1396.

Kesit Bambang Prakosa. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Prediksi Belanja Daerah. Jawa Tengan dan DIY. ISSN 1410-2420.

Mardiasmo. (2009) . *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi.

Mulyana, Budi., Subkhan, & Kuwat Slamet. 2009. *Keuangan Daerah Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*. Jakarta: LPKPAP.

Nogi, Hessel S. Tangkilisan. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo

Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo.

Sugiyono, (2013). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Umi Narimawati. (2010). *Penulisan Karya Ilmiah: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM*, Jakarta: Genesis.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang 34 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Daerah.

Yuriko Ferdian. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.